



OPTIMALISASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU DALAM MEMAJUKAN OBJEK PARIWISATA DI NEGERI SULI KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH

OPTIMIZATION OF INTEGRATED COASTAL AREA MANAGEMENT IN ADVANCEMENT OF TOURISM OBJECTS IN SULI STATE, SALAHUTU SUB-DISTRICT, CENTRAL MALUKU DISTRICT

Petronela Sahetapy

Universitas Pattimura
neetycorputty@gmail.com

Abstrak

Tema sentral penelitian ini mengarah pada optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang mana terfokus pada masalah yang dihadapi bahwa belum optimal pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata yang tampak dari sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang belum memadai, yakni selama ini pengelolaannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai penelitian yang bersifat deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 22 orang, Disamping teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan akan dideskripsikan dengan bantuan tabel frekuensi dan kriteria interpretasi skor persentase maupun dukungan kategori penilaian untuk mengetahui besar kecilnya dukungan responden dan nilai yang diperoleh dan secara terakumulasi nilai skor yang diperoleh dalam perhitungan persentase dan inerpertasinya tetap mengacu pada kesesuaiannya dengan kriteria interpretasi skor. Besaran nilai CRR/SA dan Nilai ISP bersifat relatif searah sesuai dengan peluang penetapan prioritas, yang dimulai dari nilai ISP yang terendah secara berurutan ke nilai ISP yang tertinggi untuk dilakukan peningkatan dan penguatan dalam optimalisasi hasilnya yakni, merencanakan diprioritaskan pertama, dan mengorganisir diprioritaskan ke dua, sementara menggerakkan dan mengawasi diprioritaskan secara bersamaan sebagai prioritas ketiga dan diharapkan dalam tindak lanjutnya dapat terlaksana dengan baik guna pengembangan pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pengelolaan, Wilayah Pesisir, Objek Pariwisata.

Abstract

The central theme of this research leads to optimizing the management of coastal areas in an integrated manner in advancing tourism objects in Negeri Suli, Salahutu District, and Central Maluku Regency, which focuses on the problems faced that are not yet optimal in the integrated management of coastal areas in advancing tourism objects, which can be seen from the facilities and infrastructure as well as inadequate supporting facilities, namely that so far the management has not been in accordance with what is expected. As a descriptive study with a total sample of 22 people, in addition to data analysis techniques carried out quantitatively, the results will be described with the help of frequency tables and percentage score interpretation criteria, as well as assessment category support to determine the size of the respondent's support and the value obtained. The accumulated score value obtained in the



calculation of the percentage and its interpretation still refers to its conformity with the score interpretation criteria. The CRR/SA value and ISP score are relatively unidirectional according to the opportunity for prioritization, starting from the lowest ISP value sequentially to the highest ISP value for improvement and strengthening in optimizing the results, namely, planning is prioritized first, and organizing is prioritized second, while mobilizing and supervising are prioritized simultaneously as the third priority, and it is hoped that the follow-up can be carried out properly for the development of tourism in Negeri Suli, Salahutu District, and Central Maluku Regency..

Keywords : Optimization, Management, Coastal Areas, Tourism Objects.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wilayah pesisir adalah salah satu wilayah yang indah dan memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan dan perlu dikelola dengan baik untuk menunjang pembangunan pariwisata. Pendekatan pembangunan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produk wisata merupakan esensi dari pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat (Adikampana, 2017). Pendekatan ini memiliki nilai strategis yaitu mampu menciptakan produk wisata yang bercirikan budaya setempat. Pariwisata jika dikelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi ekonomi secara langsung kepada masyarakat di sekitar daerah pariwisata. Sehingga secara tidak langsung pariwisata dapat memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah (Rusyidi & Fedryansah, 2018).

Negeri Suli merupakan salah satu dari beberapa negeri yang menjadi destinasi wisata di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki obyek wisata yang perlu dikembangkan guna dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan Pendapatan Desa/Negeri dan menunjang Pendapatan Asli Daerah. Negeri Suli memiliki beberapa kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah obyek tujuan wisata karena didukung topografi wilayah dataran tinggi (Suli Atas) dan rendah (Suli Bawah) dekat dengan pantai yang diarahkan sebagai kawasan pesisir pendukung pariwisata.

Negeri Suli telah dikenal dengan wisata pantainya, yakni Pantai Natsepa dan Pantai Sopapei yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan luar dan lokal. Kedua tempat wisata pesisir ini telah terkenal dan menjadi kebanggaan Pemerintah Negeri Suli dan masyarakat setempat. Sekalipun itu, masih ada banyak kekurangan yang terlihat jika ditinjau lebih jauh, yakni sarana dan prasarannya belum memadai dan membutuhkan pembenahan. Ini harus cepat dilakukan mengingat letaknya sangat strategis, terutama Pantai Natsepa yang letaknya tepat di depan jalan provinsi yang merupakan jalan utama di Negeri Suli yang menghubungkan Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, sehingga pentingnya menjadi perhatian pemerintah untuk dapat memprioritaskan pembangunan pariwisatanya yang ditunjang dengan manajemen pengelolaan pariwisata yang mumpuni.

Dengan demikian perlu pengelolaan wilayah pesisir yang dibarengi sarana dan prasarana pariwisata yang memadai sehingga dapat memajukan objek wisata yang ada di Negeri Suli. Tentu hal ini sangat membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk dapat wewujudkannya dengan baik. Namun yang menjadi kendala selama ini adalah belum terwujudnya kerjasama antara ketiga pihak untuk memajukan pembangunan pariwisata di Negeri Suli. Sementara masyarakat sampai saat ini sangat mengharapkan akan kelengkapan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung objek wisata. Disamping wilayah pesisir perlu ditata sesuai dengan kebutuhan dan keindahan objek wisata yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh akan hal ini, akan dibuktikan melalui penelitian ini yang dilakukan secara langsung di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.



METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Definisi dan Operasional Variabel

Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata melandasi pada pengelolaan yang menggerakkan setiap orang atau sekelompok orang dengan menggunakan metode ilmiah serta dibantu sumber tertentu manajemen dan mengoperasikan fungsinya dalam mengakomodir setiap kegiatan, yakni: 1) Merencanakan, 2) Mengorganisir, 3) Menggerakkan, dan Mengawasi (Winardi 2005). Secara operasional terlihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Operasional Variabel

No.	Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dalam Memajukan Objek Pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah	
	Aspek-aspek Pengukuran	Instrumen (Kuesioner)
		Item
1.	Merencanakan	1,2,3,4,5,6,7
2.	Mengorganisir	8,9,10,11,12,13
3.	Menggerakkan	14,15,16,17,18,19
4.	Mengawasi	20,21,22,23,24

Sumber: Winardi (2010)

Terkait operasional variabel tersebut, maka pengukurannya dilakukan melalui item-item pertanyaan dalam bentuk pernyataan adalah dengan menggunakan empat poin Skala Likert, dimana jika terdapat jawaban dengan bobot rendah, maka diberikan skor 1 (satu) dan seterusnya sehingga jawaban yang berbobot tinggi diberikan skor 3 (tiga). Kategori dari masing-masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut: a) Mendukung (M) = 3; b) Kurang Mendukung (KM) = 3; c) Tidak Mendukung (TM) = 1.

Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan berlokasi di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang dilandasi oleh masalah yang terjadi sebagai suatu fenomena dilokasi penelitian. Posisi lokasi penelitian dijangkau dan diteliti. Kiranya dalam proses penelitian berlangsung dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingan penelitian dilaksanakan sehingga terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 1) Pemerintah Negeri Suli; 2) Masyarakat pesisir di lingkungan wisata; 3) Masyarakat yang berjualan di tempat wisata; 4) Wisatawan; dan 5) Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah. Demikian pengambilan sampel secara jenuh terhadap Pemerintah Negeri yang berjumlah 8 orang, Unsur masyarakat dan wisatawan diambil secara insidental, yakni masyarakat pesisir di lingkungan wisata dengan ketetapan 4 orang, begitu pula dengan masyarakat yang berjualan di tempat wisata dengan ketetapan 4 orang, dan wisatawan yang berkunjung dengan ketetapan yang sama 4 orang. Sementara pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah di ambil secara purposive sebanyak 2 orang pegawai. Demikian sampel yang berjumlah 22 orang yang dimaksudkan, dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.



Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang terpercaya bagi pengumpulan data sangat menentukan keabsahan/kesahihan suatu penelitian. Data yang dihimpun dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, antara lain:

1. Data primer bersumber atau diperoleh dari responden, akan dikumpulkan melalui suatu penelitian lapangan dan diharapkan responden dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat saat ini tentang pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
2. Data sekunder akan dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi, untuk memperoleh data/informasi dari buku-buku yang terkait dengan substansi penelitian, dan penelusuran dokumentasi serta laporan yang terkait pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan teknik pengumpulan data dan wujud data yang akan dikumpulkan, maka dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan dua teknik utama sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, untuk memperoleh keterangan ilmiah dari buku-buku, dokumen, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Lapangan, yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dalam mengumpulkan data dengan cara :
 - a. Observasi, yakni pengamatan dilakukan terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
 - b. Wawancara untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh dari observasi ataupun dokumen, yakni wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kuesioner, yakni memberikan pertanyaan tertulis secara tertutup disertai dengan alternatif jawaban tentang sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan peneliti tetap bersikap positif dan objektif dari awal sampai akhir untuk kepentingan perolehan data tentang pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Teknik Analisis Data

Guna kepentingan analisis data menyangkut dengan optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, maka teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan dideskripsikan dengan bantuan tabel frekuensi dan kriteria interpretasi skor persentase maupun dukungan kategori penilaian untuk mengetahui besar kecilnya dukungan responden dan nilai yang diperoleh dan secara terakumulasi nilai skor yang diperoleh dalam perhitungan persentase dan interpretasinya tetap mengacu pada kesesuaiannya dengan kriteria interpretasi skor (Riduwan, 2003:41). Selanjutnya dikonversikan untuk melakukan penafsiran data dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan akhir berdasarkan nilai penetapan prioritas dengan memperlihatkan bahwa sesuai atau tidaknya subjek yang dipilih secara sosiometrik, yaitu perhitungan Indeks Status Pilihan (ISP) (Nazir, 2003:369). Melalui teknik analisis sosiometrik ISP, diharapkan dapat mewujudkan sosiogram yang jelas dan tepat bagi tindak lanjut bagi optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Penyajiannya memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi metode, reliabilitas serta validitas instrument yang digunakan dalam penelitian. Perlu juga dijelaskan bagaimana ragam populasi yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta proses sampling yang dilakukan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Singkat Pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah

Dalam perkembangan pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tidak terlepas dari rencana penetapan batas wilayah pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata, yakni batas Timur antara Suli dan Tial, dan satunya itu Suli dan Tulehu, batas Barat antara Paso sampai jembatan Waitatiri itu secara administratif, wilayah Waitatiri Natsepa sampai dengan yang baru dibangun adalah *Baby Beach* itu masuk dalam petualangan Negeri Suli. Jadi dari Waitatiri, *Water Boom* kemudian *Baguala Resort* lari ke Natsepa Satu, Natsepa Dua terus ke Sopapei itu agak sedikit panjang. Kemudian dari objek wisata yang disebutkan itu ada Telaga Cinta di Suli atas sampai ke tempat panen sagu di pinggir jalan dekat *Baby Beach* itu adalah batas terakhir antara Suli dan Tial, yang merupakan merupakan wilayah petuanan Negeri Suli.

Dalam sistem pengelolaan, untuk *Water Boom* dikelola oleh pengusaha keturunan cina, dan Natsepa Satu dikelola oleh Keluarga Manuputty dan penginapan-penginapan itu milik pribadi, sementara Natsepa Dua di bagian dalam dikelola langsung oleh Pemda Maluku Tengah karena milik Pemda Maluku Tengah yang dibeli langsung dari pemilik pribadi dan pelepasan hak dari pemilik Keluarga Matitawael di Negeri Suli ke Pemda Maluku Tengah. Yang termasuk tinjauan Pemda Maluku Tengah hanya yang terdapat dalam wilayah pantai Natsepa Dua sejak 2007 atau 2008 hingga sekarang. perumahan yang ada di dalam itu adalah tempat ganti milik Pemda Maluku Tengah, kalau penginapan itu sudah di luar, jadi pembangunan di dalam itu ada sebagian milik Pemda Maluku Tengah dan ada sebagian milik pribadi. Batas antara milik Pemda Maluku Tengah dan masyarakat ada pada penginapan itu, disebelahnya milik keluarga Haliwela, dan penginapan milik keluarga, dan disebelahnya lagi pembangunan yang sementara dibuat tetapi karena gempa sehingga dihentikan sampai sekarang dan pemilik modal pembangunan itu adalah pengusaha keturunan Cina Suli. Sedangkan yang jualan di luar itu sebenarnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah negeri. Jadi yang di luar itu tidak termaksud dalam tinjauan pemda.

Sementara itu, Pantai Sopapei sebagian kecil telah dijual kepada Wijaya seorang pengusaha keturunan Cina sampai di batas tembok dan dikelola secara pribadi. Tetapi sebagian besar dari Pantai Sopapei tidak dijual kepada Pengusaha Keturunan Cina, ada yang dikelola langsung oleh pemilik lahan. Sekarang areanya sudah diperluas, malahan sekarang yang punya milik pribadi sudah mulai diperluas sampai ke tengah Negeri Suli. Dibelakang Gereja Suli Bawah setiap hari libur sekarang sudah ada yang datang berwisata disitu, karena disitu ada salah satu tempat wisata yang dikelola oleh Keluarga Salampessy, areanya dari Pantai Sopapei balik kiri mentok di ujung jalan itu baru dikelola oleh pemiliknya Keluarga Salampessy. Tepat di belakang Gereja Suli Bawah ada permandian air panas, mentok disitu ada gedung serbaguna, kemudian ada kali Norihua. Dulu tim peneliti turun mencari sumber panas bumi untuk pembangkit listrik panas bumi, sekarang mereka cari geotermal punya diantara Negeri Suli dan Negeri Tulehu dan di sebelahnya milik UKIM, lalu tempat bor itu mereka turun ke bawah. Jadi setelah sumur itu di boring keluar air panas jadi air panas itu keluar tanpa mesin pengisap jadi keluar sendiri sehingga masyarakat membuat bak, namun tidak terawat dengan baik sehingga mereka aliri dengan pipa sampai ke talit di pasang perpipaan sehingga mandi bisa di pakai dibagian perpipaan tempat keluarnya air panas.

Secara keseluruhan yang terpenting bagi Negeri Suli khususnya di bagian bawah, adalah bagaimana bisa merubah pemikiran masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan di lingkungan pesisir, jangan buang sampah di pantai karena kebanyakan yang terjadi bagian pantai jika disapu kemudian sampah lalu diangkat buang ke pantai, terkadang bukan hanya daun-daun yang dibuang tetapi segala macam apalagi sampah plastik banyak dibuang, ini harus dirubah pemikiran masyarakat sekitar untuk bagaimana menjaga kebersihan, dan bagaimana menjaga ketertiban.

Mencegah terjadinya abrasi yang dapat memperburuk keadaan sekitar pantai karena abrasi sudah cukup jauh, oleh sebab itu pemerintah menangani sehingga tidak sampai terjadi abrasi lebih parah yang dapat menyebabkan rumah-rumah warga terkikis. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan talut di pesisir pantai, mulai dari Mandalise sampai mau dapat Pantai Sopapei untuk melindungi pemukiman secara keseluruhan. Jika itu tidak dilakukan dua sampai empat tahun yang lalu, pasti rumah



sekitar pantai terkena dampak abrasi dan sebagian tidak bisa tinggal sehingga harus pindah tempat pemukiman, itu kondisi yang terjadi dan hanya bisa bersyukur karena akhirnya rumah-rumah masih tetap ada dan terlindung dari talut yang telah dibuat. Rumah-rumah yang ada disekitar itu mulai menjaga kebersihan sehingga mendatangkan orang untuk berwisata ditempat yang baru dan untuk itu pola pikir masyarakat berubah kearah itu. Suatu ketika masyarakat Negeri Suli yang tinggal di bagian bawah tidak perlu membawa jualan ke Natsepa lagi, mereka hanya bisa keluar dari rumah turun ke pantai dan bisa berjualan di situ.

Pada prinsipnya orang memahami bahwa pendapatan Negeri Suli cukup besar dengan adanya objek wisata seperti yang telah disebutkan itu. Namun selama ini Pemerintah Negeri Suli belum *ambel ngase* (retribusi) dari tempat wisata, *ngase* baik dari pengelolaan Galian C tidak pernah ada, itu merupakan pendapatan PAD hasil dari Negeri Suli. Saat ini Staf Negeri Suli sementara membuat rancangan program, rancangan peraturan, oleh karena belum ada Peraturan Negeri (PERNEG). Rancangan ini atas kerja sama dengan fakultas ekonomi UKIM, yang mana rancangan drafnya baru dibuat bersama terkait dengan bangunan yang sementara di bangun harus dibahas secara tersendiri baru dikirim kembali ke kabupaten sebab ada hal-hal yang belum bisa dilakukan karena belum ada PERNEG, dan harus dibahas di Saniri Negeri Suli dulu kemudian baru dikirim ke Kabupaten Maluku Tengah. Demikian dalam rangka pengelolaan itu kalau sudah ada dasar hukumnya merupakan Peraturan Negeri (PERNEG) itu berarti PAD dalam rancangan untuk satu tahun itu diperkirakan 500 juta ke atas itu minimal dalam peraturannya.

Masyarakat pelaku usaha yang berjualan di dalam kompleksnya pemda itu semua bayar ke pemda kecuali yang tidak masuk di area pemda. Selama ini tidak ada koordinasi antara pemda dan pemerintah negeri. Jadi dari dahulu menurut mantan Raja yang berproses waktu itu menyangkut pembagian hasil yang dimaksud ada dalam peraturan daerah provinsi, padahal tidak ada realisasi apa-apa. Jadi sebenarnya ada sistem pembagian hasilnya sampai saat ini. Sebenarnya pihak Negeri Suli merasa rugi tetapi harusnya Pemda Maluku Tengah menyikapi peraturan daerah Provinsi menyangkut pembagian hasil. Namun sebenarnya tidak menuntut lebih daripada itu. Diharapkan anggota-anggota dewan dapat mengedepankan itu tetapi tidak juga disikapi dan tindak lanjut dengan baik. Harusnya diperjuangkan karena itu menjadi aset negeri terutama yang berada di depan jalan merupakan aset pemerintah negeri dan perlu merubah pola pikir masyarakat.

Negeri Suli ini masih diperintah oleh pejabat dari tahun 2012 sampai sekarang. Secara histori, Negeri Suli pernah diperintah oleh keluarga da Costa paling lama padahal mereka bukan masyarakat adat, tetapi karena pendekatan mereka sama penjajah dan bagian dari orang Portugis, makanya mereka mempercayakan memimpin, makanya sejarah itu hilang karena keluarga da Costa memimpin Negeri Suli sangat lama.

Dari tahun 2012 sampai sekarang belum dilakukan pemilihan Raja karena masih kabur tentang sejarah sebenarnya siapa yang menjadi Raja, sehingga Pemerintah Negeri Suli kerjasama dengan Prof.S. Nirahua, M.Hum yang membantu dalam proses penyusunan PERNEG, menyangkut mata rumah perintah. Jadi dalam Negeri Suli ini berhak mencalonkan anak soa dari empat soa yang ada, yakni masing-masing mencalonkan bakal calonnya. Sebenarnya pada tanggal 4 Mei 2020 sudah dilaksanakan pemilihan tetapi karena pandemi pemerintah membatalkan, setelah pandemi pertama covid-19 di awali dengan katong sudah beribadah tapi karena ada kendala-kendala tertentu sehingga terhambat sampai sekarang. Sebenarnya panitia sudah bekerja, sudah dibentuk dari awal 2020 dan untuk tindak lanjutnya perlu kerja keras Panitia Pemilihan Raja sehingga terpilih Raja Negeri Suli sebagai kepala pemerintahan definitif sehingga dapat memimpin Negeri Suli dengan baik dan dapat mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang menunjang sektor pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Karakteristik Responden

Dalam penelitian pengumpulan data melalui pengisian identitas responden adalah sangat penting dan bermanfaat dalam menggambarkan karakteristik responden. Maka sesuai dengan data yang terampungkan dideskripsikan meliputi jenis kelamin, usia, dan pendidikan diuraikan pada tabel 5 di bawah ini.



Tabel 5. Karakteristik Responden

NO.	Uraian	F				(%)			
		PN	MSY	WS	PP	PN	MSY	WS	PP
I.	Jenis Kelamin								
	1. Laki – Laki	6	5	2	2	27	23	9	9
	2. Perempuan	2	3	2	-	9	14	9	-
	Jumlah	8	8	4	2	38	37	18	9
II.	Usia								
	1. Kurang dari 30 Tahun	-	2	1	-	-	9	4	-
	2. 31-40 Tahun	-	4	2	1	-	18	9	4
	3. 41-50 Tahun	-	2	1	1	-	9	4	4
	4. Diatas 50 Tahun	8	-	-	-	32	-	-	-
Jumlah	8	8	4	2	32	36	17	8	
III.	Pendidikan Terakhir								
	1. SMA/Sederajat	6	4	1	-	27	18	4	-
	2. Strata Satu (S1)	1	3	2	2	4	14	9	9
	3. Strata Dua (S2)	1	1	1	-	4	4	4	-
	Jumlah	8	8	4	2	35	36	17	9

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021

Data tabel di atas menggambarkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang (68%), yang terdiri dari Pemerintah Negeri (PN) 6 orang 27%, Masyarakat (MSY) yakni masyarakat pesisir di lingkungan wisata; dan masyarakat yang berjualan di tempat wisata sebanyak 5 orang 23%, dan Wisatawan (WS) sebanyak 2 orang 9% serta Pegawai Pariwisata (PP) sebanyak 2 orang 9%. Selain itu responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 7 orang (32%), antara lain Pemerintah Negeri (PN) 2 orang 9%, dan Masyarakat (MSY) yang tidak lain adalah masyarakat pesisir di lingkungan wisata dan masyarakat yang berjualan di tempat wisata sebanyak 3 orang 14%, dan Wisatawan (WS) sebanyak 2 orang 9%, sementara Pegawai Pariwisata (PP) tidak ada yang berjenis kelamin perempuan.

Kemudian responden dengan tingkat usia kurang dari 30 tahun sebanyak 3 orang (14%) yang terdiri dari Masyarakat (MSY) pesisir di lingkungan tempat wisata dan yang berjualan di tempat wisata sebanyak 2 orang 9%, sementara Pemerintah Negeri dan Pegawai Pariwisata tidak ada yang usianya di bawah 30 tahun. Sedangkan responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 7 orang (32%), diantaranya masyarakat (MSY), yakni masyarakat pesisir di lingkungan wisata dan yang berjualan di tempat wisata sebanyak 4 orang 18%, disamping Wisatawan (WS) sebanyak 2 orang 9% dan Pegawai Pariwisata (PP) 1 orang 4%, sementara yang tidak berada dalam kisaran usia tersebut, yaitu Pemerintah Negeri. Selain itu responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 4 orang (18%), yang mana Masyarakat (MSY), yakni masyarakat pesisir di lingkungan wisata dan yang berjualan di tempat wisata sebanyak 2 orang 9%, Wisatawan (WS) 1 orang 4% dan Pegawai Pariwisata (PP) juga 1 orang 4%, sedangkan Pemerintah Negeri (PN) tidak ada yang tergolong dalam rentangan usia tersebut. Sementara responden yang berusia diatas 50 tahun ke atas sebanyak 8 orang (32%), yakni semuanya adalah Pemerintah Negeri, sedangkan Masyarakat (MSY) baik masyarakat pesisir di lingkungan wisata maupun yang berjualan di tempat wisata, Wisatawan (WS) dan Pegawai Pariwisata (PP) tidak berada dalam kategori usia yang dimaksud.

Selanjutnya tingkat pendidikan terakhir responden bervariasi, yakni responden yang berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 11 orang (50%) yang terdiri dari Pemerintah Negeri 6 orang 27%, dan Masyarakat (MSY), yaitu masyarakat pesisir di lingkungan wisata maupun yang berjualan di tempat wisata sebanyak 4 orang 18%, dan Wisatawan (WS) 1 orang 4%, sementara yang tidak termasuk pada jenjang pendidikan terakhir tersebut adalah Pegawai Pariwisata (PP). Adapun responden yang berpendidikan S1 sebanyak 8 orang (32%), diantaranya Pemerintah Negeri (PN) 1 orang 4% dan Masyarakat (MSY) yang tidak lain adalah masyarakat pesisir di lingkungan wisata maupun yang berjualan di tempat wisata sebanyak 3 orang 14%, dan Wisatawan (WS) sebanyak 2 orang 9%, begitupun dengan Pegawai Pariwisata (PP) sebanyak 2 orang (9%). Terakhir responden yang berpendidikan S2 sebanyak 3 orang (14%), yaitu Pemerintah Negeri 1 orang 4%, Masyarakat (MSY) khususnya masyarakat pesisir di lingkungan wisata 1



orang 4% dan juga Wisatawan (WS) 1 orang 4%, sementara Pegawai Pariwisata tidak termasuk dalam jenjang pendidikan terakhir yang dimaksud.

Bertolak dari karakteristik responden tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa dari segi jenis kelamin responden laki-laki lebih dominan dari responden perempuan. Sementara dari segi usia kebanyakan responden sudah tergolong dalam rentang usia non produktif terutama Pemerintah Negeri (PN), dan dari segi pendidikan terakhir banyak yang berpendidikan SMA. Namun perlu diakui bahwa didukung pula dengan responden yang berpendidikan S1 dan S2 baik Pemerintah Negeri (PN), Masyarakat (MSY), Wisatawan (WS), dan Pegawai Pariwisata (PP). Dengan corak karakter responden yang dimiliki tentu diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang lengkap dan menunjang penelitian ini dalam capaian tujuan dan hasil yang diharapkan.

Tanggapan Responden

Sesuai dengan data yang diperoleh melalui instrument yang digunakan meluputi aspek-aspek pengukuran dari optimalisasi engelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dapat dikemukakan padatable 6di bawah ini.

Tabel 6. Persentase Tanggapan Responden

Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dalam Memajukan Objek Pariwisata Di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah			
Aspek-Aspek Pengukuran	Persentase Tanggapan Responden		
	M	KM	TM
A. Merencanakan			
Pernyataan	3	2	1
1. Aktor-aktor merencanakan penetapan batas wilayah pengelolaan wisata	14 64%	6 27%	2 %
2. Aktor-aktor menentukan sarana/prasarana wisata yang dibutuhkan	16 73%	5 23%	1 4%
3. Aktor-aktor memastikan kegiatan pembangunan wisata tidak mangalami kendala	12 54%	9 41%	1 4%
4. Aktor-aktor memperhitungkan dampak kumulatif pembangunan wisata	14 64%	6 27%	2 %
5. Aktor-aktor mengetahui batasan pembangunan wisata secara fisik tidak menimbulkan ancaman	12 54%	9 41%	1 4%
6. Penda menyikapi dan mendukung rencana kegiatan pembangunan wisata	15 68%	5 23%	2 9%
B. Mengorganisir			
Pernyataan	3	2	1
1. Aktor-aktor mengorganisir tugas-tugas dalam penetapan batas wilayah pengelolaan wisata	12 54%	8 36%	2 9%
2. Aktor-aktor menyepakati keputusan dalam menentukan sarana/prasarana wisata yang dibutuhkan	15 68%	5 23%	2 9%
3. Aktor-aktor terkonsentrasi dalam memperhitungkan dampak kumulatif dari pembangunan objek wisata	17 77%	3 14%	2 9%
4. Aktor-aktor terobsesi dalam menyikapi batasan pembangunan kondisi fisik yang menimbulkan kendala	13 59%	7 32%	2 9%
5. Aktor-aktor termotivasi dalam mempromosikan perbaikan wilayah pesisir	15 68%	6 27%	1 4%
6. Penda menyikapi dan mendukung organisir kegiatan pembangunan wisata	12 54%	9 41%	1 4%



C. Menggerakkan		M	KM	TM
Pernyataan		3	2	1
1. Aktor-aktor yang berwenang menggerakkan dan menetapkan batas wilayah pengelolaan wisata		16	4	2
		73%	18%	9%
2. Aktor-aktor terkoordinir dalam melengkapi sarana/prasarana wisata		13	7	2
		59%	32%	9%
3. Aktor-aktor diarahkan untuk memperhitungkan dampak kumulatif dari pembangunan wisata		15	6	1
		68%	27%	4%
4. Aktor-aktor diberikan petunjuk untuk mengetahui batasan pembangunan fisik yang menimbulkan ancaman		12	9	1
		54%	41%	4%
5. Aktor-aktor disuport untuk mempromosikan perbaikan wilayah pesisir tempat objek wisata		14	6	2
		64%	27%	9%
6. Pemda menyikapi dan mendukung gerakan kegiatan pembangunan wisata		17	4	1
		77%	18%	4%
D. Mengawasi		M	KM	TM
Pernyataan		3	2	1
1. Aktor-aktor mengawasi batas pengelolaan objek wisata		13	7	2
		59%	32%	9%
2. Aktor-aktor memantau sarana/prasarana wisata		16	5	1
		73%	23%	4%
3. Aktor-aktor mengendalikan kegiatan pembangunan objek wisata		12	9	1
		54%	41%	4%
4. Aktor-aktor mendampingi setiap kegiatan mempromosikan perbaikan wilayah pesisir tempat objek wisata		15	6	1
		68%	27%	%
5. Pemda menyikapi dan mendukung awasi kegiatan pembangunan wisata		17	4	1
		77%	18%	4%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dari aspek merencanakan mendapat dukungan positif dari responden sebesar 64% yang menyatakan aktor-aktor merencanakan penetapan batas wilayah pengelolaan wisata, 73% menyatakan aktor-aktor menentukan sarana/prasarana wisata yang dibutuhkan, 54% menyatakan aktor-aktor memastikan kegiatan pembangunan wisata tidak mengalami kendala, 64% menyatakan aktor-aktor memperhitungkan dampak kumulatif pembangunan wisata, dan 77% menyatakan Pemda menyikapi dan mendukung rencana kegiatan pembangunan wisata 68%.

Dari aspek mengorganisir memperoleh dukungan positif dari responden sebesar 54% yang menyatakan aktor-aktor mengorganisir tugas-tugas dalam penetapan batas wilayah pengelolaan wisata, 68% menyatakan aktor-aktor menyepakati keputusan dalam menentukan sarana/prasarana wisata yang dibutuhkan, 77% menyatakan aktor-aktor terkonsentrasi dalam memperhitungkan dampak kumulatif dari pembangunan objek wisata, 59% menyatakan aktor-aktor terobsesi dalam menyikapi batasan pembangunan kondisi fisik yang menimbulkan kendala, 68% menyatakan aktor-aktor termotivasi dalam mempromosikan perbaikan wilayah pesisir, dan 54% menyatakan Pemda menyikapi dan mendukung organisir kegiatan pembangunan wisata.

Dari aspek menggerakkan mendapat dukungan positif dari responden sebesar 73% yang menyatakan aktor-aktor yang berwenang menggerakkan dan menetapkan batas wilayah pengelolaan wisata, 59% menyatakan aktor-aktor terkoordinir dalam melengkapi sarana/prasarana wisata, 68% menyatakan aktor-aktor memperhitungkan dampak kumulatif dari pembangunan wisata, 54% menyatakan aktor-aktor diberikan petunjuk untuk mengetahui batasan pembangunan fisik yang menimbulkan ancaman, 64%



menyatakan aktor-aktor disuport untuk mempromosikan perbaikan wilayah pesisir tempat objek wisata, dan 77% menyatakan Pemda menyikapi dan mendukung gerakan kegiatan pembangunan wisata.

Dari aspek mengawasi memperoleh dukungan positif dari responden sebesar 59% yang menyatakan aktor-aktor mengawasi batas pengelolaan objek wisata, 73% menyatakan aktor-aktor memantau sarana/prasarana wisata, 54% menyatakan aktor-aktor mengendalikan kegiatan pembangunan objek wisata, 68% menyatakan aktor-aktor mendampingi setiap kegiatan mempromosikan perbaikan wilayah pesisir tempat objek wisata, dan 77% menyatakan Pemda menyikapi dan mendukung awasi kegiatan pembangunan wisata.

Pembahasan Merencanakan

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata yang dilakukan dengan baik bertumpu pada masyarakat, pemerintah, dan pengusaha yang memiliki kontribusi yang relatif sama secara moralitas dalam pengembangan pariwisata. Tentu dalam pengembangan dan pengelolaannya diawali dengan suatu perencanaan yang matang untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Perencanaan berarti tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti (Winardi, 2010). Agar perencanaan efektif harus mampu melihat setiap aspek dari sebuah persoalan dan juga mengerti atau memahaminya secara keseluruhan (Meredith *et.al.*, 1996:59). Kebanyakan orang, karena terlihat dalam kegiatan khusus dan terbatas, hanya dapat melihat bagian-bagian dari persoalan. Ditangan pengelola terletak tantangan untuk memadukan semua bagian itu sehingga menjadi suatu pandangan yang menyeluruh atas persoalan tersebut.

Dengan demikian bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dilakukan melalui suatu perencanaan yang matang. Hasil penelitian membuktikan bahwa akumulasi persentase skor yang dicapai dari aspek merencanakan sebesar 57%, yakni aktor-aktor merencanakan penetapan batas wilayah pengelolaan wisata, menentukan sarana/prasarana wisata yang dibutuhkan, memastikan kegiatan pembangunan wisata tidak mangalami kendala, memperhitungkan dampak kumulatif pembangunan wisata, dan Pemda menyikapi dan mendukung rencana kegiatan pembangunan wisata telah diwujudkan dan berada pada interval 50 – 60%.

Mengorganisir

Setelah perencanaan dilakukan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata sebagaimana ditetapkan arah serta susunan dari pada tindakan masa yang akan datang, maka langkah berikut untuk melaksanakan pekerjaan adalah membagi-bagi komponen-komponen aktivitas kerja antara anggota-anggota kelompok dan mencatat bantuan masing-masing anggota kelompok tersebut. Ini merupakan cara terbaik menurut Eppler (2007), bahwa untuk menganalisis pekerjaan dan perubahan yang ada terutama jenis (struktural atau siklus), pola, serta relevansinya dengan organisasi. Aktivitas-aktivitas komponen tersebut dibagi sedemikian rupa hingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pengeluaran seminimal mungkin atau dicapainya kepuasan kerja pekerja yang maksimal. Tugas membagi pekerjaan dan penetapan hubungan serta tindakan mempertahankan hubungan yang dikenal sebagai “pengorganisasian” yang merupakan keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara teratur, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan.

Pengorganisasian adalah tindakan mendistribusi pekerjaan antar kelompok yang ada dan menetapkan dan memerinci hubungan-hubungan yang diperlukan (Winardi, 2010). Untuk itu bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dilakukan melalui suatu pengorganisasian yang matang. Hasil penelitian membuktikan bahwa akumulasi persentase skor yang dicapai dari aspek mengorganisir sebesar 63%, yakni aktor-aktor mengorganisir tugas-tugas dalam penetapan batas wilayah pengelolaan wisata, menyepakati keputusan dalam menentukan sarana/prasarana wisata yang dibutuhkan, terkonsentrasi dalam memperhitungkan dampak kumulatif dari pembangunan objek wisata, terobsesi dalam menyikapi batasan pembangunan kondisi fisik yang menimbulkan kendala, termotivasi dalam mempromosikan perbaikan wilayah pesisir,



dan Pemda menyikapi dan mendukung organisir kegiatan pembangunan wisata telah diwujudkan dan berada pada interval 61 – 70%.

Menggerakkan

Guna menjalankan aktivitas-aktivitas secara fisik yang timbul karena langkah-langkah perencanaan serta pengorganisasian yang dilakukan, maka perlu melakukan tindakan-tindakan yang memulai dan melanjutkan tindakan-tindakan yang diperlukan agar dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diemban. Dalam hal ini, penggerakkan dilakukan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu guna memajukan objek pariwisata. Untuk itu, dalam prosesnya beroperasi secara kreatif dan dinamis dengan memperhitungkan resiko yang ada dan selalu mencoba cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu (Pranoto dan Suprpti, 2003). Cara-cara yang ditempuh memimpin, mengembangkan para pengelola, memberikan instruksi, membantu para anggota untuk memperbaiki hasil pekerjaan dan diri mereka sendiri melalui kreativitas mereka masing-masing dan tindakan memberikan kompensasi. Pekerjaan demikian dinyatakan sebagai tindakan “menggerakkan” yang meliputi seluruh elemen organisasi dalam menjalankan tugas yang diembankan.

Menggerakkan berarti merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik dan secara entusiastis (Winardi, 2010). Oleh sebab itu bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan melalui suatu pengorganisasian yang matang. Hasil penelitian membuktikan bahwa akumulasi persentase skor yang dicapai dari aspek menggerakkan sebesar 66%, yakni aktor-aktor yang berwenang menggerakkan dan menetapkan batas wilayah pengelolaan wisata, terkoordinir dalam melengkapi sarana/prasarana wisata, memperhitungkan dampak kumulatif dari pembangunan wisata, diberikan petunjuk untuk mengetahui batasan pembangunan fisik yang menimbulkan ancaman, disuport untuk mempromosikan perbaikan wilayah pesisir tempat objek wisata, dan Pemda menyikapi dan mendukung gerakan kegiatan pembangunan wisata telah diwujudkan dan berada pada interval 60 – 70%.

Mengawasi

Salah satu langkah akhir yang penting adalah pengawasan dilakukan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu guna memajukan objek pariwisata. Para pengelola menganggap perlu untuk mengecek atau mengontrol apa yang telah dilaksanakan untuk mencapai kepastian bahwa pekerjaan pihak lain berlangsung dengan memuaskan kearah pencapaian sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini oleh Etzioni (1985:8) dinyatakan sebagai bagian dari tujuan yang dikehendaki pada masa yang akan datang yang senantiasa dikejar agar dapat direalisasikan. Kadang-kadang waktu pekerjaan sedang berlangsung timbul adanya diskrepansi-diskrepansi, hal-hal yang sulit dipecah-pecahkan, salah pengertian dan gangguan-gangguan yang tidak diduga semula, dan hal tersebut cepat harus disampaikan kepada pihak pengelola, agar ia dapat melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan. Fungsi demikian dikenal sebagai “pengawasan”, yakni proses kegiatan pengelola untuk memastikan dan menjamin bahwa tindakan-tindakan pencapaian tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Mengawasi berarti mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana-rencana (Winardi, 2010). Oleh karena itu, bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan melalui suatu pengawasan yang matang. Hasil penelitian membuktikan bahwa akumulasi persentase skor yang dicapai dari aspek menggerakkan sebesar 66%, yakni aktor-aktor mengawasi batas pengelolaan objek wisata, memantau sarana/prasarana wisata, mengendalikan kegiatan pembangunan objek wisata, mendampingi setiap kegiatan mempromosikan perbaikan wilayah pesisir tempat objek wisata, dan Pemda menyikapi dan mendukung awasi kegiatan pembangunan wisata telah diwujudkan dan berada pada interval 60 – 70%.

Penilaian dan Pengambilan Keputusan Guna Menentukan Prioritas Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dalam Memajukan Objek Pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah



Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu harapan dan capaian yang diinginkan dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, sehingga pihak manajemen dituntut untuk dapat mewujudkan pengelolaan secara optimal untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang efektif dan efisien. Demikian maka secara keseluruhan untuk mencapai kejelasan konkrit sesuai dengan hasil penelitian yang telah diuraikan dilakukan pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas peningkatan dan penguatan dalam optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu harapan dan capaian yang diinginkan dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan besaran persentase Capaian Rata-rata (C_{RR}) dari Skor Akumulatif (S_A) yang dikonversikan secara Sosiometrik sesuai Indeks Status Pilihan (ISP). Demikian maka hasil konversi menunjukkan bahwa:

1. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang terfokus pada hasil merencanakan terwujudkan dengan C_{RR}, S_A 57% dinilai Kurang dan keputusan akhir yang diambil adalah dilakukan peningkatan dan penguatan dalam optimalisasinya dengan ISP 0.367 prioritas I.
2. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang terfokus pada hasil mengorganisir terwujudkan dengan C_{RR}, S_A 63% dinilai Cukup dan keputusan akhir yang diambil adalah masih perlu dilakukan peningkatan dan penguatan dalam optimalisasinya dengan ISP 0.428 prioritas II.
3. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang terfokus pada hasil menggerakkan terwujudkan dengan C_{RR}, S_A 66% dinilai Cukup dan keputusan akhir yang diambil adalah masih perlu dilakukan peningkatan dan penguatan dalam optimalisasinya dengan ISP 0.448 prioritas III.
4. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang terfokus pada hasil mengawasi terwujudkan dengan C_{RR}, S_A 66% dinilai Cukup dan keputusan akhir yang diambil adalah masih perlu dilakukan peningkatan dan penguatan dalam optimalisasinya dengan ISP 0.448 prioritas III.

Dari hasil penilaian dan pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas bagi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang dimaksud, besaran nilai C_{RR}/S_A dan Nilai ISP bersifat relatif searah sesuai dengan peluang penetapan prioritas, yang dimulai dari nilai ISP yang terendah secara berurutan ke nilai ISP yang tertinggi untuk dilakukan peningkatan dan penguatan dalam optimalisasi hasilnya yakni, merencanakan diprioritaskan pertama, dan mengorganisir diprioritaskan ke dua, sementara menggerakkan dan mengawasi diprioritaskan secara bersamaan sebagai prioritas ketiga dan diharapkan dalam tindak lanjutnya dapat terlaksana dengan baik guna pengembangan pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, disebabkan oleh aktor-aktor pelaksana atau pengelola yang belum merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengawasi setiap kegiatan pengembangan pariwisata dengan baik.
2. Jika dilakukan peningkatan dan penguatan dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengawasi setiap kegiatan optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu akan memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.



3. Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu sesuai harapan dan capaian yang diinginkan dapat dilakukan melalui peningkatan dan penguatan dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan dan mengawasi setiap kegiatan yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh aktor-aktor pelaksana atau pengelola dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah bertumpuh pada prioritas yang telah ditentukan.
4. Faktor-faktor yang menentukan optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata adalah bagian dari merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengawasi setiap kegiatan pengembangan pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
5. Temuan penelitian ini berimplikasi secara prioritas sesuai nilai indeks status pilihan (ISP) bagi optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dalam memajukan objek pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Rekomendasi

Saran yang dikemukakan sebagai kontribusi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis pentingnya dilakukan pendalaman pemahaman konsep teori optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan objek pariwisata secara terperinci dan dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan pengembangan yang terprosedur dan bersifat ilmiah, yang dapat bermanfaat bagi operasionalisasi dalam proses optimalisasi yang hasilnya dapat dibuktikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara empiris dan terjamin sebagai fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya.
2. Secara praktis dapat dijadikan acuan dalam mendesain kerangka operasional sebagai kerangka kerja yang tersusun secara sistematis yang lebih terfokus ketepatan merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengawasi setiap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir secara optimal dalam memajukan objek pariwisata dan memenuhi harapan masyarakat pada sektor pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikampana, I. M. (2017). *In Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Denpasar: Cakra Press.
- Arfianti Nur Sa'idah, 2017, "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)" *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H / 2017 M*.
- Dewi Kusuma Sari, 2011 "Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang" *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011*.
- Eppler, Mark, 2007, *57 Kesalahan Total Dalam Manajemen Yang Dapat Anda Hindari (Management Mess-Ups)*, Terjemahan Juni Prakoso, Tangerang : Kharisma Publishing Group
- Hiariey, L. S. (2013). Peran Serta Masyarakat Pemanfaat Pesisir dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Ambon Dalam. *Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi*, Vol 14 No 1, hal 48 - 61.
- Meredith, Geoffrey, M., Nelson, Robert, E., Neck Philip, 2000, *Kewirausahaan: Teori dan Praktek*, Seri Manajemen 97, Jakarta : Lembaga PPH.
- Muhammad Brian Adam 2018, "Strategi Pengembangan Pariwisata Pesisir Di Kawasan Taman Wisata Pantai Ngliyep Kabupaten Malang Muhammad Brian Adam" *Departemen Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2018*.
- Nasir, Moh, 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia.
- Nike Ika Nuzula, 2016, "Optimasi Pengelolaan Ekowisata Pesisir: Studi Kasus Pesisir Taman Nasional Baluran Indonesia," *Magister Program Coastal Engineering And Management Faculty Of Marine Technology Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2016*.
- Pranoto, Juni dan Suprpti, Wahyu, 2003, *Membangun Kerjasama Tim*, Jakarta : LAN RI.



- Riduwan, 2003, Dasar-Dasar Statistik, Bandung: Alfabeta.
- Rullyana Puspitaningrum Mamengko¹, dan Erlina Daru Kuntari², 2020 “Pengelolaan Pariwisata Bahari Berbasis Community-Based Tourism Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir”¹ Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, Email: rullyana.mamengko@uny.ac.id ²Akademi Pariwisata Buana Wisata Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, Email: erlina@akparbuanawisata.ac.id ISSN 16935969, Media Wisata, Volume 18, Nomor 1, Mei 2020 EISSN 26858436.
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. 2018. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol 1 No 3, hal 155 - 165.
- Stoner, James A.F., R. Edward, Freeman, dan Daniel, R. Gilbert JR., 2003, Manajemen, Jilid I, Terjemahan Akexander Sindoro, Jakarta : PT. Indeks Gramedia Grup.
- Sugiono, 2004, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.
- Sujana, 2004. Metode Statistika, Bandung : Tarsito.
- Sujarweni, Wiratna, V., 2014, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Terry, George, R., 2000, Asas-Asas Manajemen, Terjemahan J.Winardi, Bandung: Alumni.
- Ticoalu, D. E., Reppie, E., & Telleng, A. T. 2013. Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap di Kota Manado. Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, Vol 1 No 3, hal 76 - 80.
- Tulungen, J. J. 2001. Program Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu dan Berbasis Masyarakat: Telaah Kasus di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.
- Winardi, J., 2005, Pemikiran Sistemik Dalam Bidang Organisasi Dan Manajemen, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- , 2010, Asas-Asas Manajemen, Bandung: Mandar Maju.

